



DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i6>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## **Analisis Aktor Terkait Konflik Horizontal Antara Suku Jawa dan Suku Pekal (Studi Kasus Dampak Dari Rencana Pertambangan Batubara PT. X di Desa Suka Maju Kecamatan Marga Sakti Sebelat Bengkulu Utara)**

**Nadio Putra Hariansyah<sup>1\*</sup>, Heni Nopianti<sup>2</sup>, Syaifullah<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia, [nadioputrahariansyah@gmail.com](mailto:nadioputrahariansyah@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia, [heninopianti@unib.ac.id](mailto:heninopianti@unib.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia, [syaifullah@unib.ac.id](mailto:syaifullah@unib.ac.id)

\*Corresponding Author: [nadioputrahariansyah@gmail.com](mailto:nadioputrahariansyah@gmail.com)

**Abstract:** *The background of the research is based on the issue of horizontal conflict between Pekalese and Javanese tribes due to the presence of PT X's coal mining plan, which wants to mine in the Air Kuro hamlet of Suka Maju Village. The research aims to identify potential conflicts of interest and solutions that favor environmental sustainability and social justice. The theory used in this research is Dahrendorf's conflict theory in the context of conflict between Javanese and Pekalese tribes. The research method uses qualitative with descriptive research type: unstructured interviews and non-participant observation, the technique of determining informants using purposive sampling and documentation. The research results are based on a conflict of interest for those who are pro or agree that the mine is operating. Because they get positive impacts such as employment opportunities, increased income, and infrastructure development as direct benefits from mining operations. Meanwhile, the contra group tends to be concerned about environmental damage and the potential loss of housing and agricultural land, which are the source of their livelihood. It is concluded that the horizontal conflict between the Javanese and Pekalese tribes occurred due to differences in interests between those who are pro and those who are against the coal mining plan by PT X.*

**Keywords:** *Actor analysis, Horizontal Conflict, Jawa and Pekal*

**Abstrak:** Latar belakang penelitian didasarkan pada persoalan konflik horizontal antara suku Pekal dan Jawa dari hadirnya rancangan pertambangan batu bara PT. X yang ingin menambang di dusun Air Kuro Desa Suka Maju. Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi potensi konflik kepentingan dan solusi yang memihak pada keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Teori yang digunakan pada penelitian ini teori konflik dari Dahrendorf dalam konteks konflik antar Suku Jawa dan Suku Pekal. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Wawancara tidak terstruktur dan observasi non-partisipan, teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling serta dokumentasi. Hasil penelitian didasarkan pada konflik kepentingan bagi pihak yang pro atau setuju bahwa tambang tersebut

beroperasi. Karena mereka mendapat dampak positif seperti peluang kerja, peningkatan pendapatan, dan pembangunan infrastruktur sebagai keuntungan langsung dari operasi tambang. Sementara itu, kelompok yang kontra cenderung khawatir tentang kerusakan lingkungan, dan potensi kehilangan tempat tinggal dan lahan pertanian yang menjadi sumber mata pencaharian mereka. Disimpulkan bahwa terjadinya konflik horizontal antara Suku Jawa dan Suku Pekal karena perbedaan kepentingan antara yang pro dan kontra terhadap rencana pertambangan batu bara oleh PT X.

**Kata Kunci:** Analisis Aktor, Konflik Horizontal, Suku Jawa dan Suku Pekal

## PENDAHULUAN

Desa Suka Maju adalah desa yang terletak di wilayah Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara, mayoritas yang mendiami Desa Suka Maju ialah suku pekal dan suku jawa. Suku Pekal merupakan suku yang dikelompokkan kedalam rumpun melayu yang dimana bahasa pekal ini terdapat kemiripan dengan bahasa minangkabau dan rejang. Tradisi dan budaya pekal ini dipengaruhi oleh kedua suku minangkabau dan rejang (Lasantha 2015).

Suku Jawa adalah suku yang terkenal dengan seni dan tradisinya, terutama yang dipengaruhi oleh kepercayaan Hindu Buddha, seperti pementasan Wayang. Suku Jawa terdapat di berbagai Provinsi di Indonesia salah satunya di Provinsi Bengkulu yang tersebar di kabupaten Bengkulu Utara dan terdapat di Desa Suka Maju (Susanto Jumaidi 2023).

Awal hadirnya suku jawa di Desa Suka Maju karena adanya program transmigrasi pada tahun 1981–1982 bermukim di beberapa desa, seperti Desa Karang Pulau, Desa Air Petai, Desa Karang Tengah, dan Desa Air Muring. Mereka kemudian menyebar di Desa Karya Pelita, Desa Suka Makmur, Desa Air Putih, Desa Cipta Mulya, dan Desa Air Pandan. sampai akhirnya, pendatang yang tinggal di Desa Suka Maju dan Suka Baru.

Desa Suka Maju selain memiliki keberagaman suku dan budaya, juga memiliki potensi keanekaragaman hayati hutan Sumatera seperti Gajah Sumatera, Harimau Sumatera, Rangkong dan juga bunga Rafflesia yang menjadi ikon Provinsi Bengkulu. Tidak hanya itu Desa Suka Maju juga memiliki potensi sumber daya alam batubara yang menarik perhatian investor. Dengan adanya potensi batubara ini, perusahaan tambang batubara PT. X bertujuan ingin mengambil sumber daya tersebut. Perusahaan ini mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara seluas 4.051 hektar berdasarkan SK I-315.DESDM Tahun 2017 (Soprian Ardianto 2023).

Namun, rencana pertambangan Batu bara PT. X mendapatkan perlawanan yang kuat dari Koalisi Selamatkan Bentang Alam Seblat, alasan penolakannya mulai dari rusaknya sumber air bersih bagi berbagai desa, perubahan ekologis, bencana hidrometeorologi, merusak habitat flora dan fauna serta berdasarkan pengumuman rencana penyusunan AMDAL PT. X aktivitas pertambangan batubara akan berdampak pada kualitas udara, kebisingan dan getaran, berkurangnya keragaman flora dan fauna serta konflik sosial dan keresahan masyarakat (Mayasari 2021).

Saat ini, konflik sosial antara masyarakat telah terjadi, khususnya masyarakat Desa Suka Maju. Konflik ini bukan sekadar gejolak antar individu, tetapi menyangkut perpecahan yang mendalam antara kedua kelompok etnis yang tinggal di wilayah tersebut yakni Suku Jawa dan Suku Pekal.

Konflik sosial yang terjadi akibat perbedaan kepentingan, ada masyarakat yang menginginkan adanya pertambangan batubara dan ada yang menolak karena izin pertambangan batubara tersebut berada di atas pemukiman rumah masyarakat yang mayoritas suku jawa tepatnya di wilayah Air Kuro. Konflik ini berdampak pada tidak dilibatkannya masyarakat Suku Jawa dalam rapat, diskusi dan juga pengambilan keputusan pada tingkat desa.

Penyebab konflik horizontal di Indonesia adalah karena kesenjangan ekonomi dan gagalnya akulturasi budaya masyarakat dengan masyarakat adat dan juga faktor komunikasi. Komunikasi seringkali merupakan masalah yang melekat dalam konflik komunikasi dalam kehidupan tidak dianggap sebagai aspek penting, yang kemudian menimbulkan konflik horizontal yang tidak pernah terselesaikan dan akan terulang kembali (Fahrimal 2014).

Konflik horizontal diartikan juga sebagai konflik yang terjadi pada masyarakat diantara seseorang maupun kelompok yang mempunyai kesamaan posisi, seperti konflik dengan sesama manusia dan konflik sesama organisasi. Konflik horizontal berwujud perlawanan yang memiliki kesamaan dalam kepentingan terhadap sesuatu yang bersifat terbatas (Anjani 2021).

Menurut Ralf Dahrendorf dalam (Fiska 2021) Konflik muncul dari hubungan sosial di dalam sistem. Oleh karena itu kecil kemungkinan suatu konflik akan melibatkan kelompok atau kelompok yang tidak terhubung dengan kelompok tersebut. Teori Dahrendorf menjelaskan bahwa hubungan dalam struktur sosial ditentukan oleh kekuasaan

Konflik horizontal yang terjadi di Desa Suka Maju, khususnya di Dusun Air Kuro, merepresentasikan kompleksitas pertentangan kepentingan dalam konteks rencana pertambangan batu bara. Mengacu pada teori Dahrendorf (2018) dan Fisher et al. (2021), konflik ini melibatkan berbagai aktor dengan peran yang berbeda - dari aktor primer seperti masyarakat Suku Pekal yang pro-tambang (diwakili oleh Kepala Desa, ketua adat, dan BPD) hingga Suku Jawa yang kontra-tambang (didukung oleh LSM lingkungan dan Koalisi Selamatkan Bentang Alam Seblat). Dimensi struktural konflik ini, sebagaimana dijelaskan oleh Galtung (2019), mencakup ketimpangan akses sumber daya, perbedaan kepentingan ekonomi, dan kesenjangan kekuasaan dalam pengambilan keputusan, yang kemudian memicu polarisasi identitas etnis dan ketegangan sosial di antara kedua kelompok.

Dinamika konflik ini semakin kompleks karena adanya perbedaan persepsi tentang pembangunan dan distribusi manfaat yang tidak merata. McCarthy & Zald (2022) menjelaskan bahwa mobilisasi sumber daya dan pembentukan jaringan menjadi strategi kunci bagi kedua belah pihak dalam memperjuangkan kepentingannya. Sementara itu, Turner & Tajfel (2020) menegaskan bahwa situasi konflik ini telah memperkuat identitas in-group masing-masing pihak, yang pada gilirannya memperparah stereotip dan prasangka antar kelompok. Kondisi ini telah merusak kohesi sosial antara masyarakat Suku Jawa dan Suku Pekal, menciptakan fragmentasi dalam kehidupan bermasyarakat yang sebelumnya relatif harmonis. Resolusi konflik yang efektif membutuhkan pendekatan dialog multi-stakeholder yang melibatkan semua aktor kunci, didukung dengan skema pembagian manfaat yang adil dan transparan, serta komitmen terhadap pelestarian lingkungan.

Melihat beberapa faktor penyebab Konflik horizontal antara suku Jawa dan suku Pekal mengindikasikan adanya ketegangan antar etnis yang bisa berpotensi merusak keharmonisan sosial dan kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan melakukan analisis aktor, kita dapat mengidentifikasi para pemangku kepentingan yang ikut serta pada kasus, motif, strategi mereka, dan dampak lingkungan dari rencana pertambangan batubara PT. X memiliki dampak lingkungan yang signifikan, termasuk potensi kerusakan ekosistem dan sumber daya alam lokal.

Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan studi untuk memahami bagaimana konflik antar suku memengaruhi tindakan terkait dengan masalah lingkungan, pengelolaan Sumber Daya Alam. Analisis aktor akan membantu mengungkap bagaimana kepentingan ekonomi dan politik berinteraksi dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, khususnya pertambangan batubara.

Untuk mengidentifikasi potensi konflik kepentingan dan solusi yang memihak pada keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Kemudian Konflik horizontal antara suku Jawa dan suku Pekal tidak hanya berkaitan dengan masalah lingkungan dan ekonomi, tetapi juga melibatkan aspek sosial dan budaya yang kompleks. Analisis aktor akan membantu kita

memahami peran lembaga, pemimpin masyarakat, dan faktor-faktor sosial lainnya yang memengaruhi dinamika konflik ini.

Maka dari itu, perlu studi yang berjudul analisis aktor terkait konflik horizontal antara Suku Jawa dan Suku Pekal Studi Kasus Dampak Rencana Pertambangan Batubara PT. X di Desa Suka Maju Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan diantaranya berjudul “Budaya Bakar Batu Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Horizontal pada Masyarakat Adat Suku Dani” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Upaya menyelesaikan konflik horizontal pada masyarakat suku Dani, dengan cara menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini adalah masyarakat melakukan ritual pembakaran batu sebagai perdamaian untuk menghormati ketentuan hukum adat. Hukum adat mewajibkan permasalahan diselesaikan melalui ritual bakar batu, karena merupakan forum kebudayaan tertinggi dalam sejarah masyarakat suku Dani (Imelda Wenda 2023).

Penelitian relevan lainnya berjudul “Konflik Horizontal dan Uapaya Penanggulannya (Studi di Kelurahan Cakra Utara Kota Mataram)” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab konflik horizontal di Desa Cakranegara Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa, dengan mengurangi pengangguran, pemerintah dapat meredakan konflik horizontal di masyarakat dengan meningkatkan ekonomi masyarakat (Natsir 2022).

Penelitian relevan lainnya berjudul “Konflik Antaretnis di Indonesia dan Upaya Penanggulangannya” Penelitian ini bertujuan untuk membahas penyelesaian permasalahan terkait kekerasan dan diskriminasi antaretnis di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa konflik di Indonesia harus ada solusi konkrit agar kasus serupa tidak terulang kembali di kemudian hari (Ghinaya Aulia, Mitamimah, and Pratiwi 2023).

## **METODE**

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk sebagai mendeskripsikan, menjelaskan serta merekonstruksikan fenomena sosial atau realitas sosial yang berlangsung di masyarakat secara keilmuan, dengan menggunakan teori dan metode. Penelitian kualitatif berusaha untuk menginterpretasikan fenomena dari kacamata pelaku (informan) berdasarkan fenomena yang diteliti (Ismail Suardi Wekke, 2019).

Merujuk pada (Creswell and Poth 2018) pendekatan ini dipilih karena kemampuannya dalam mengungkap kompleksitas fenomena sosial melalui perspektif para pelaku, khususnya dalam konteks konflik horizontal antara Suku Pekal dan Suku Jawa di Desa Suka Maju. Pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi metode yang mencakup: (1) observasi non-partisipan sistematis dengan durasi dua bulan, menggunakan protokol observasi terstruktur untuk mencatat dinamika interaksi antar kelompok; (2) wawancara semi-terstruktur mendalam dengansalah satu informan kunci yang dipilih melalui teknik purposive sampling berbasis kriteria (*criterion-based purposive sampling*), di mana kriteria utama meliputi: keterlibatan langsung dalam konflik, posisi kepemimpinan formal atau informal, dan durasi tinggal minimal 5 tahun di lokasi penelitian; dan (3) analisis dokumenter terhadap arsip desa, laporan LSM, dan dokumentasi media lokal (Fitri Amalia 2021). Validitas data dijamin melalui member checking, di mana hasil interpretasi dikonfirmasi kembali kepada informan, serta peer debriefing dengan peneliti sejawat untuk meminimalkan bias peneliti (Rasyid Anwar Dalimunthe 2020).

Proses analisis data mengadopsi model interaktif (Miles, Huberman, and Saldana 2014), yang terdiri dari tiga tahap simultan: Reduksi Data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pada tahap reduksi data, merujuk pada proses pemilihan, penyederhanaan dan pemisahan data “mentah” dari pengumpulan data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Tahap penyajian data dilakukan secara naratif, untuk peneliti menjelaskan secara rinci hasil temuan tentang Analisis Aktor Tekait Konflik Horizontal Antara Suku Jawa dan Suku Pekal. Penyajian data dilakukan melalui matriks tematik dan diagram alir yang menggambarkan pola hubungan antar tema, sementara proses penarikan kesimpulan melibatkan analisis komparatif konstan untuk mengembangkan proposisi teoretis tentang dinamika konflik. Untuk meningkatkan kredibilitas penelitian, diterapkan audit trail yang mendetail, di mana setiap langkah pengambilan keputusan metodologis didokumentasikan secara sistematis. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan bracketing technique untuk mengakui dan meminimalkan potensi bias peneliti, serta thick description untuk memastikan transferabilitas temuan ke konteks yang serupa (Sinambela, Simanjuntak, and Telaumbanua 2019)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik antara Suku Pekal dan Suku Jawa di Kecamatan Marga Sakti Seblat, Kabupaten Bengkulu Utara, merepresentasikan kompleksitas persinggungan antara kepentingan ekonomi, dinamika sosio-kultural, dan isu lingkungan dalam konteks industri ekstraktif. Merujuk pada teori *Political Ecology* yang dikembangkan oleh (Bryant and Bailey 2021) konflik ini mencerminkan ketegangan klasik antara paradigma pembangunan ekonomi dan keberlanjutan ekologis. Studi yang dilakukan oleh (Welker 2019) di kawasan tambang Kalimantan Timur menunjukkan pola serupa, di mana kehadiran industri ekstraktif menciptakan polarisasi komunitas berdasarkan garis etnis dan kepentingan ekonomi. Berbeda dengan kasus di Kalimantan yang menunjukkan dominasi kepentingan ekonomi, konflik di Marga Sakti Seblat memiliki dimensi tambahan berupa potensi bencana ekologis yang signifikan, sebagaimana divalidasi oleh data Kementerian ESDM tentang risiko longsor dan kajian dampak lingkungan terhadap Sungai Seblat yang berpotensi mempengaruhi sembilan desa di sekitarnya.

Dinamika konflik ini juga dapat dianalisis menggunakan kerangka Environmental Justice yang dikemukakan oleh (Schlosberg 2020) yang menekankan pentingnya distribusi risiko dan manfaat dalam proyek-proyek ekstraktif. Penolakan AMDAL oleh Kementerian LHK mengindikasikan adanya permasalahan fundamental dalam aspek keberlanjutan proyek, mirip dengan kasus tambang Newmont di Nusa Tenggara Barat yang diteliti oleh (Li 2021) di mana pertimbangan risiko lingkungan akhirnya mengalahkan potensi keuntungan ekonomi jangka pendek. Lebih jauh, mengacu pada studi komparatif (Ballard and Banks 2023) tentang konflik tambang di Asia Tenggara, pola konflik di Marga Sakti Seblat menunjukkan karakteristik unik dalam hal peran aktor lokal dan legitimasi tradisional yang bertransformasi menjadi kekuatan politik dalam konteks industri ekstraktif. Fenomena ini berbeda dengan pola umum di mana konflik tambang biasanya terpolarisasi antara korporasi dan masyarakat lokal sebagai entitas tunggal. (Uye 2023).

## Pembahasan

### Proses Terjadinya Konflik Horizontal

Konflik suku Pekal dan Suku Jawa yang berada di Desa Suka Maju, dusun Air Kuro berawal dari kehadiran PT. X yang ingin melakukan pertambangan batu bara di Dusun Air Kuro, adanya rancangan Pertambangan batu bara di Desa Suka Maju Dusun Air Kuro mendapat penolakan dari beberapa koalisi selamatkan bentang alam seblat dan masyarakat dusun air kuro, alasan masyarakat suku jawa menolak pertambangan beroperasi di dusun air kuro mereka khawatir terhadap dampak yang di timbulkan dari kegiatan pertambangan batu

bara. Sejumlah masyarakat Jawa dan koalisi selamatkan bentang alam sebelat dan LSM menolak pertambangan batu bara tersebut.

a. Penyebab Konflik Horizontal antara Suku Pekal dan Suku Jawa

Setiap Konflik memiliki faktor penyebab, seperti perbedaan pendapat, perbedaan tujuan, komunikasi dan klarifikasi, inkonsistensi kebijakan remunerasi dan kebijakan pertambangan pasti memengaruhi setiap konflik.

Rancangan pertambangan batu bara PT. X di Desa Suka Maju, Dusun Air Kuro, telah menimbulkan konflik horizontal antara suku Pekal dan suku Jawa. Konflik ini muncul karena perbedaan kepentingan di antara kedua kelompok suku tersebut. Di satu sisi, ada yang pro terhadap tambang, mendukung operasi tambang yang diyakini akan membawa manfaat ekonomi. Di sisi lain, ada yang kontra terhadap tambang, menolak operasi tambang karena khawatir akan dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kehidupan sosial mereka.

Berdasarkan dari hasil wawancara menurut bapak SR dari Suku Jawa

*“sebelum menjadi kepala desa ada perjanjian penolakan tambang dan di tanda tangani di atas matrai”*

dengan perjanjian ini yang telah di ingkari oleh kepala Desa Suka Maju membuat masyarakat Dusun Air Kuro hilang kepercayaan atas kepemimpinan kepala desa. Tanda-tanda yang terjadi dapat menimbulkan dampak sosial yaitu konflik horizontal antara masyarakat karena memiliki perbedaan kepentingan menurut Robert MZ Lawang menyebutkan Konflik adalah usaha untuk memperoleh status, nilai, dan kekuasaan. mereka yang memiliki kepentingan hanya memperoleh keuntungan (Tike 2017).

Perbedaan kepentingan ini menciptakan ketegangan antar tokoh masyarakat, di mana masing-masing kelompok memiliki kekhawatiran terhadap dampak dari proyek tambang tersebut. Kelompok yang pro terhadap tambang melihat adanya peluang kerja, peningkatan pendapatan, dan pembangunan infrastruktur sebagai keuntungan langsung dari operasi tambang. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak RI

*“Ada perjanjian dengan PT. Inmas abadi untuk membuat jembatan serta utuk yang bekerja di tambang batu bara harus masyarakat pribumi”*

Dengan pernyataan bapak RI dapat di simpulkan memang benar adanya perbedaan kepentingan, menurut Dahrendorf, konflik kepentingan adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam interaksi antara pihak yang memiliki kekuasaan dan individu yang tidak memiliki kekuasaan.

Sementara itu, kelompok yang kontra cenderung khawatir tentang kerusakan lingkungan, dan berpotensi hilangnya permukiman hingga area pertanian yang merupakan mata pencaharian mereka. Berdasarkan hasil wawancara dengan AA

*“Alasan menolak ya karena coba lihat tambang yang ada di bengkulu utara apakah berdampak banyak pada masyarakat kan nggak malah banyak dampak negatif jalan jadi rusak, debu dimana-mana bekas galian gak di tutup kembali”*

Perbedaan kepentingan inilah yang dapat menimbulkan konflik yang tidak sadari oleh masyarakat karena penyebabnya sudah ada sedangkan mereka tidak menyadari akan hal itu. Selain itu tidak diajak nya masyarakat Dusun Air kuro saat mengadakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Dan juga tidak adanya musyawarah saat pengukuran lahan yang seharusnya di lakukan musyawarah, sebagaimana yang di ungkapkan MN

*“Pengukuran tanah yang seharusnya 100x25 untuk setiap rumah pengukuran tersebut tidak sesuai dengan yang di berikan pemerintah dan yang di ukur oleh pemerintah itu ada yang 25x20, 20x15 tidak adanya konsisten dalam pengukuran tersebut”*

Berdasarkan wawancara dengan MN terdapat banyak hal janggal dengan pemerintah desa dan kurang terbukanya pemerintah dalam pengambilan sesuatu seperti menerima rencana pertambangan PT. X di Desa Suka Maju Dusun Air Kuro.

## b. Perbedaan Kepentingan

Dalam interaksi sosial masyarakat, terdapat variasi yang mencolok, baik antara seseorang maupun kelompok atau karena kepentingan. Soejono Soekanto menyatakan bahwa perbedaan kepentingan adalah salah satu penyebab konflik. Dia mengatakan, "Ketika setiap seseorang atau kelompok memiliki keperluan yang berbeda pada suatu waktu. Terkadang orang berpartisipasi dalam kegiatan yang sama, tetapi kegiatannya berbeda (Irwandi and Chotim 2017).

Dapat dikatakan perbedaan kepentingan yang terjadi di desa Suka Maju dan Dusun Air Kuro memiliki kepentingan, Pemerintah Desa Suka Maju dan Masyarakat Suku Pekal menginginkan tambang beroperasi di Dusun Air Kuro karena melihat adanya potensi pembangunan infrastruktur dan peluang kerja di tambang. Namun dilain sisi bagi masyarakat Suku Jawa yang berada di Dusun Air Kuro menolak adanya tambang batu bara karena mereka melihat dampak yang akan terjadi di Dusun tersebut, dampak yang terjadi seperti longsor, banjir bandang, dan kehilangan tempat tinggal.

Menurut saudara MN bahwa dalam rancangan pertambangan di Dusun Air Kuro ada beberapa kepentingan, baik kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok dari pihak suku Pekal. MN menemukan bahwa aparat desa menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi dan kolektif. Seperti yang diungkapkan MN

*“Maunya si kades itu apa sedangkan masyarakat disini menolak adanya tambang batu bara sedangkan perjanjian di awal sebelum menjadi kades itu menolak adanya pertambangan”*.

Berdasarkan wawancara dengan MN terlihat bahwa kepala desa memiliki kepentingan dari hadirnya PT. X di Desa Suka Maju, kekuasaan yang dimiliki kepala desa bisa dikatakan kepala Desa Suka Maju adalah salah satu aktor yang terlibat dalam proses hadirnya PT. X di Desa Suka Maju, dengan memiliki kekuasaan sama halnya dengan yang diungkapkan Max Weber kekuasaan adalah sebuah kesempatan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok dengan tujuan untuk memenuhi keinginannya dalam hubungan sosial walaupun menentang atau menghadapi kehendak orang lain (Sarihati, Luthfie, and Kurniadi 2019).

## c. Konflik antar suku Pekal dan Suku Jawa

Kehidupan manusia selalu mengalami konflik. Jika ada perbedaan pendapat atau kepentingan di antara kelompok masyarakat tertentu, konflik selalu terjadi. Ketegangan muncul di antara kelompok masyarakat karena perbedaan pemahaman dan kepentingan. Menurut Kinseng (2008), konflik dianggap sebagai suatu bentuk ketegangan psikologis di dalam masyarakat. Selain itu, Karl Marx menganggap konflik sebagai perang kelas.

Perebutan suatu sumberdaya, itu akan menyebabkan konflik dalam masyarakat. Konflik perebutan sumber adalah ketika berbagai aktor memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda. Selain kesalahan yang terjadi selama pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya, pertikaian sumber daya agraria yang dapat menyebabkan kesalahpahaman antara warga dan pemangku kepentingan tentang proses tersebut. Konflik sumber agraria selalu terjadi di wilayah yang mempunyai sumber daya alam, terutama di wilayah yang terlibat dalam pertambangan. Akses terhadap lahan adalah salah satu dari banyak penyebab konflik agraria di kawasan pertambangan batu bara di desa Suka Maju Dusun Air Kuro.

Rencana Pertambangan Batu bara yang ingin dilakukan PT. X di Dusun Air Kuro, Desa Suka Maju, Kecamatan Marga Sakti Seblat Kabupaten Bengkulu Utara, berdampak *negatif* terhadap kondisi sosial masyarakat. Adanya Rencana pertambangan tersebut mengakibatkan konflik horizontal dalam Masyarakat Desa Suka Maju dan Dusun Air Kuro dimana Terjadi Konflik antara pihak yang pro dan pihak kontra dengan adanya rencana pertambangan batu bara.

Di sisi lain, dalam masyarakat pertambangan terdapat pandangan yang beragam. Mereka yang mendukung merupakan individu yang ikut serta pada eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, dengan harapan memperoleh keuntungan dari aktivitas penambangan. Sementara itu, kelompok yang menentang terdiri dari masyarakat yang tidak memiliki kepentingan langsung dalam industri pertambangan. Mereka cenderung memikirkan dampak jangka panjang untuk generasi mendatang, sehingga menolak kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penambangan batubara. Selain itu, kelompok penentang juga merupakan pihak yang merasakan dampak negatif dari rencana penambangan tersebut.

Konflik yang terjadi di Dusun Air Kuro Desa Suka Maju Kecamatan Marga Sakti Seblat Bengkulu Utara, adalah Konflik Horizontal antar warga masyarakat. Terdapat dua kelompok masyarakat yang sedang berkonflik. Kelompok Suku Pekal adalah orang-orang yang ingin tambang itu masuk ke Desa Suka Maju dan beroperasi di Dusun Air Kuro, sedangkan kelompok suku Jawa adalah orang-orang yang menolak pertambangan di Dusun Air Kuro. Kedua kelompok yang berkonflik ini, didasarkan pada perbedaan pemahaman dan perbedaan kepentingan mengenai rancangan pertambangan batu bara. Kelompok yang ingin tambang itu beroperasi di Dusun Air Kuro karena mereka melihat adanya potensi lapangan pekerjaan dan infrastruktur yang dijanjikan oleh PT. X. Namun rancangan pertambangan batu bara ini dapat penolakan dari masyarakat Dusun Air Kuro dan koalisi selamatkan bentang alam seblat, sebab mereka melihat dampak yang akan terjadi jika tambang batu bara masuk ke Dusun Air Kuro dapat menyebabkan terjadinya longsor, limbah, debu dan kehilangan tempat tinggal.

#### d. Konflik Laten Suku Pekal dan Suku Jawa

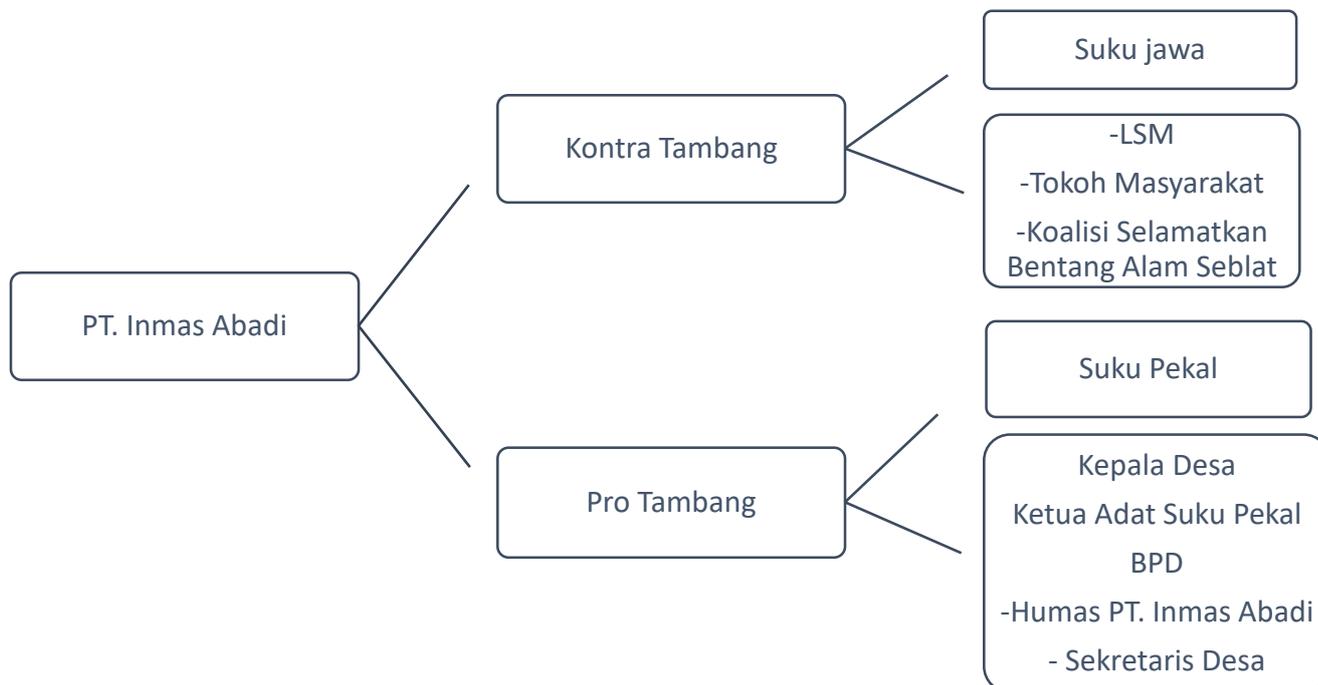
Konflik Laten di sebut juga konflik yang tidak terlihat, karena penyebab konflik sudah ada tetapi pihak-pihak yang terlibat konflik belum mengungkapkannya dan cenderung menyembunyikannya. Pada kasus Konflik Suku Pekal dan Suku Jawa berdasarkan keterangan dari Suku Jawa adanya kekecewaan terhadap Pemerintah Desa Suka Maju karena tidak diajaknya dalam pembangunan di Dusun Air Kuro mereka merasa tidak pernah diajak musyawarah dalam memutuskan sesuatu. Dalam keseharian Suku Jawa dan Suku Pekal mereka terlihat baik-baik saja, berdasarkan wawancara dengan SI mengungkapkan

*“Kalau Konflik antar suku pekal dan suku jawa saya kira belum ada kelihatan disini adem ayem bae bisa kita sebut Suku Jawa dan Suku Pekal disini 25 dan Slawe yang artinya sama saja”*

Berdasarkan wawancara dengan SI dapat dikatakan konflik yang terjadi antara Suku Jawa dan Suku Pekal ini tidak terlihat mereka menganggap bahwa konflik itu terjadi ketika sesuatu yang menimbulkan bentrok antar masyarakat, secara tidak langsung konflik Suku Pekal dan Suku Jawa belum terangkat dan mereka tidak menyadari bahwa awal mulanya konflik terjadi karena perbedaan pendapat dan kepentingan.

e. Analisis Aktor

**Gambar 1 Peta Konflik Horizontal antara Suku Pekal dan Suku Jawa**



Berdasarkan pada peta horizontal konflik yang telah tergambar, seseorang bisa melihat dengan jelas bahwa konflik tersebut terjadi di Desa Suka Maju Dusun Air Kuro Konflik yang terjadi tidak hanya melibatkan partisipasi masyarakat, tetapi juga mencakup peran pemerintah desa dan organisasi non-pemerintah. Masyarakat merupakan aktor utama dalam konflik, namun di balik itu aktor lain yang turut berperan. Hal ini terjadi pada Suku Pekal yang menginginkan tambang tersebut dieksploitasi (pro tambang), serta pada Suku Jawa yang menolak penambangan batu bara (kontra tambang). Setiap individu yang terlibat dalam hal ini adalah mereka yang memegang posisi dan memiliki kekuasaan dalam masyarakat.

Aktor-aktor yang termasuk dalam kelompok Suku Pekal pro terhadap adanya tambang yaitu; Kepala Desa, ketua adat, dan beberapa pengurus dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Aktor-aktor inilah yang menginginkan tambang beroperasi di Desa Suka Maju Dusun Air Kuro. Aktor-aktor Suku Jawa yang kontra terhadap adanya pertambangan diantaranya LSM yang berbasis pada lingkungan, koalisi selamatkan bentang alam seblat dan tokoh masyarakat Suku Jawa.

Peran dan fungsi aktor-aktor bertujuan ingin tambang batu bara beroperasi dan juga menolak tambang PT. X tersebut. Aktor-aktor yang ingin tambang beroperasi di Dusun Air Kuro merupakan aktor-aktor sentral yang mendapatkan manfaat dari adanya pertambangan batu bara, sedangkan aktor-aktor yang menolak tambang itu beroperasi merupakan aktor-aktor yang tidak mendapat manfaat dari adanya pertambang batu bara. Dari peta konflik horizontal dapat dilihat bahwa telah terjadi perselisihan karena perbedaan pemahaman dan kepentingan. *“Kami di mata pemerintah desa sering bersebrangan seakan akan kami dijadikan tumbal karena kami tidak sepemikiran dengan pemerintah kami menolak tambang sedangkan orang itu berharap tambang itu masuk ke air kuro untuk membngun disini”* (MI)

Perbedaan kepentingan yang menimbulkan konflik pada rancangan prtambang batu bara di Desa Suka Maju dan Dusun Air Kuro oleh masing masing terkait dengan keuntungan yang akan diperoleh jika tambang batu bara masuk ke Desa Suka Maju. Ada aktor yang mempunyai kepentingan untuk mengambil manfaat, tanpa mengkhawatirkan masyarakat dan

alam di Desa Suka Maju Dusun Air Kuro, sehingga ada aktor yang tidak setuju dengan pertambangan batu bara di Desa Suka Maju dan Dusun Air Kuro. Konflik ini telah merusak kehidupan sosial antara masyarakat Suku Jawa dan Suku Pekal.

f. Teori Dahrendorf Dalam Konteks Konflik Antar Suku Jawa dan Suku Pekal

Konteks konflik di Desa Suka Maju Dusun Air Kuro, sependapat dengan pemikiran Dahrendorf yang menjelaskan konflik timbul dari kenyataan yang ada pada unsur masyarakat. Kedudukan dan kekuasaan merupakan faktor penentu setiap individu dan kelompok dalam melaksanakan berbagai hal tergantung pada kekuatan yang dimilikinya. Zainudin, *et al* (2012) menjelaskan bahwa konflik muncul dari pembagian kekuasaan kepentingan yang terlihat pada perilaku kontrol aktor sosial lainnya oleh aktor sosial, sehingga tujuan utama akses terhadap sumberdaya tercapai dalam suatu cara yang dibenarkan. Kenyataan inilah yang menjadikan rencana pertambangan batu bara oleh PT. X di Dusun Air Kuro Desa Suka Maju Kecamatan Marga Sakti Seblat Bengkulu Utara berujung pada konflik Horizontal (Pakniyany, Soetarto, and Adiwibowo 2017).

## KESIMPULAN

Konflik horizontal antara Suku Pekal dan Suku Jawa di Desa Suka Maju, khususnya di Dusun Air Kuro, yang dipicu oleh kehadiran PT. X telah menciptakan dampak mendalam pada struktur sosial masyarakat. Perbedaan kepentingan terkait rencana pertambangan batubara telah memunculkan ketegangan yang signifikan, di mana masing-masing kelompok memiliki kekhawatiran tersendiri terhadap dampak proyek tersebut. Konflik ini tidak hanya melibatkan interaksi antar masyarakat, tetapi juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah desa dan lembaga swadaya masyarakat. Aktor-aktor yang mendukung operasi tambang adalah mereka yang berpotensi memperoleh keuntungan langsung, sementara yang menolak adalah pihak-pihak yang merasa tidak mendapatkan manfaat atau bahkan berpotensi dirugikan. Ketidaksiuaian kepentingan ini telah merusak tatanan sosial antara masyarakat Suku Jawa dan Suku Pekal, dimana kedudukan dan kekuasaan masing-masing kelompok menjadi faktor penentu dalam dinamika konflik yang terjadi.

Untuk mengatasi konflik horizontal ini, diperlukan serangkaian langkah strategis dan terencana. Pertama, pembentukan forum dialog regular antar suku yang difasilitasi oleh tokoh adat dan pemerintah desa perlu segera dilakukan untuk membangun komunikasi yang konstruktif. Program pemberdayaan ekonomi bersama yang melibatkan kedua suku harus dikembangkan untuk menciptakan kepentingan bersama yang dapat menjembatani perbedaan. Kesepakatan tertulis tentang pembagian manfaat dari aktivitas pertambangan perlu dirumuskan secara transparan dan adil, dengan pengawasan dari tim independen yang mewakili kedua suku.

Dalam jangka menengah, penguatan kelembagaan lokal dalam manajemen konflik harus menjadi prioritas, termasuk pengembangan kapasitas pemerintah desa dalam mediasi konflik. Program-program budaya bersama dan pelibatan generasi muda dari kedua suku dalam pembangunan desa dapat membantu memulihkan kohesi sosial. Sistem monitoring dampak sosial perlu dibentuk untuk mengawasi perkembangan situasi dan mencegah eskalasi konflik. Untuk jangka panjang, diperlukan pengembangan model pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak. Mekanisme pencegahan konflik berbasis masyarakat harus dibangun dan diperkuat, disertai dengan program-program lintas suku yang berkelanjutan. Evaluasi berkala terhadap efektivitas program penanganan konflik dan dokumentasi pembelajaran sangat penting untuk penanganan kasus serupa di masa depan. Semua upaya ini harus didukung dengan kerangka hukum yang kuat untuk mengatur relasi antara perusahaan dan masyarakat, serta komitmen semua pihak untuk mencari solusi yang menguntungkan bagi semua pihak.

## REFERENSI

- Anjani, Anatasia. 2021. "Apa Itu Konflik Horizontal? Ini Penjelasannya." *Detikedu*.
- Ballard, C., and G. Banks. 2023. *Resource Wars: The Anthropology of Mining in Southeast Asia*. Cambridge University Press.
- Bryant, R. L., and S. Bailey. 2021. "Third World Political Ecology: An Introduction."
- Creswell, J. W., and C. N. Poth. 2018. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*. Sage publications.
- Fahrimal, Yuhdi. 2014. "Peran Komunikasi Dalam Penyelesaian Konflik Horizontal Di Indonesia." *Academia.Edu*.
- Fiska. 2021. "Teori Konflik Menurut Para Ahli." *Gramedia Blog*.
- Fitri Amalia, Mega Kusuma Putri. 2021. "Analisis Pengelolaan Sampah Anorganik Di Sukawinatan Kota Palembang." 6(2):134–42.
- Ghinaya Aulia, Afianda, Aih Mitamimah, and Hanameyra Pratiwi. 2023. "Konflik Antaretnis Di Indonesia Dan Upaya Penanggulangannya." *Integritas Terbuka: Peace and Interfaith Studies* 2(1):69–76. doi: 10.59029/int.v2i1.14.
- Imelda Wenda, Ari Retno Purwanti. 2023. "Budaya Bakar Batu Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Horizontal Pada Masyarakat Adat Suku Dani." *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary* 1(1):1–11. doi: 10.57235/jerumi.v1i1.1186.
- Irwandi, and Endah R. Chotim. 2017. "Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah, Dan Swasta." *Jispo* 7(2):24–42.
- Lasantha. 2015. "Ras Asia Di Seluruh Dunia." *Proto Malayan*.
- Li, T. M. 2021. "Political Ecology of Resource Extraction: Legitimacy, Power, and Protest in Indonesian Mining Communities." *Journal of Southeast Asian Studies* 42(2):295–315.
- Mayasari, Anggi. 2021. "Koalisi Selamatkan Bentang Seblat Tolak Rencana Penambangan Batu Bara Oleh PT Inmas Abadi." *Antara News.Com*.
- Miles, M. B., A. M. Huberman, and J. Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. SAGE Publications.
- Natsir, Ivan. 2022. "Konflik Horizontal Dan Upaya Penanggulangannya (Studi Di Kelurahan Cakra Utara Kota Mataram)." *Journal Kompilasi Hukum* 7(2). doi: 10.29303/jkh.v7i2.104.
- Pakniany, Yamres, Endriatmo Soetarto, and Soeryo Adiwibowo. 2017. "PERTAMBANGAN EMAS DI WILAYAH MALUKU BARAT DAYA : KUTUKAN ATAU BERKAH ? ( Studi Kasus Konflik Akses Sumber Agraria )." *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 163–70.
- Rasyid Anwar Dalimunthe. 2020. *STRATEGI PEMBELAJARAN KITAB KUNING DI PESANTREN*. edited by S. Nasution. Medan: Perdana Publishing Medan.
- Sarihati, Tati, Muhammad Luthfie, and Budi Kurniadi. 2019. *Komunikasi Politik, Media Massa Dan Opini Publik*. Vol. 11. Bandung.
- Schlosberg, D. 2020. *Environmental Justice and the New Pluralism*. Oxford University Press.
- Sinambela, Kristiana, Trisna Simanjuntak, and Sadieli Telaumbanua. 2019. "Aspek Kohesi Gramatikal Dan Leksikal Pada Karangan Eksposisi Kelas X Sma Negeri 1 Laguboti Kabupaten Toba Samosir T.a 2018\2019." *Jurnal Genre (Bahasa, Sastra, Dan Pembelajarannya)* 1(1):9–17. doi: 10.26555/jg.v1i1.1054.
- Soprian Ardianto. 2023. "Ancam Lingkungan Hidup, Koalisi Selamatkan Bentang Seblat Tolak PT Inmas Abadi." *Info Negeri.Id*.

- Susanto Jumaidi, Tri Indriawati. 2023. "Suku Bangsa Asli Di Pulau Jawa." *Kompas.Com*.
- Tike, Arifuddin. 2017. "Pola Komunikasi Dalam Penanggulangan Konflik (Arifuddin Tike) POLA KOMUNIKASI DALAM PENANGGULANGAN KONFLIK." *Jurnal Tabligh* 1–13.
- Uye. 2023. "Warga Di Usir, PT. Inmas Abadi Nekat Bahas AMDAL." *Genesis*.
- Welker, M. A. 2019. "The Social Life of Mining Projects: Ethnographic Perspectives from East Kalimantan." *American Ethnologist* 46(1):90–104.